

ANALISIS KOMPETENSI DAN TINGKAT KEAHLIAN DALAM MELAKUKAN REVIU KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH

Maryanti Sannang Madao¹, Manuel A. Todingbua², Amir Jaya³

Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makasar, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: yantimadao13@gmail.com¹, manuel_august@ukipaulus.ac.id², amirjaya0505@ukipaulus.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi dan tingkat keahlian dalam melakukan Reviu kebutuhan barang milik daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini mulai dari kegiatan Survei, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Infoman penelitian ini sebanyak 10 orang pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Metode analisis pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data pada penelitian ini mulai dari: Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kompetensi pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah sudah cukup mendukung tugas pokok mereka, penting untuk terus meningkatkan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan agar pegawai dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas khususnya pada Reviu kebutuhan barang milik daerah. 2) Tingkat keahlian pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menunjukkan potensi yang baik untuk pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan akuntabel. 3) Proses reviu Barang Milik Daerah yang dilakukan dengan beberapa tahap mulai dari Perencanaan Reviu, Pengumpulan Data dan Informasi, Pemeriksaan Lapangan (Verifikasi Fisik), Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Identifikasi Masalah dan Penyimpangan, Penyusunan Laporan Hasil Reviu, Penyampaian Laporan dan Tindak Lanjut dan Monitoring dan Evaluasi.

Kata kunci : kompetensi, tingkat keahlian, reviu barang milik daerah.

Abstract

This study to analyze the competence and skill level in conducting the review of the needs for regional property at the Inspectorate of Papua Tengah Province. This research employs a qualitative descriptive method. The object of this study is the Inspectorate of Papua Tengah Province. The data sources in this research consist of two sources, namely primary data and secondary data. The data collection methods in this study include surveys, observations, interviews, and documentation. The informants in this research comprise 10 employees at the Inspectorate of Papua Tengah Province. The analysis method used in this study is qualitative descriptive analysis. The stages of data analysis in this research include: Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing. The results of this study conclude that: 1) The competence of employees at the Inspectorate of Papua Tengah Province sufficiently supports their main duties; it is

important to continuously improve relevant and sustainable training so that employees can perform optimally in their tasks, particularly in the review of the needs for regional property. 2) The skill level of employees at the Inspectorate of Papua Tengah Province shows good potential for effective and accountable management of regional property. 3) The process of reviewing regional property is carried out through several stages, including Review Planning, Data and Information Collection, Field Inspection (Physical Verification), Needs Analysis and Management of Regional Property, Problem and Deviation Identification, Preparation of Review Report, Reporting and Follow-up, and Monitoring and Evaluation.

Keywords: *Competence, skill level, review of regional property.*

Pendahuluan

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam konteks efisiensi penggunaan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi (Governance, 2024; Nur et al., 2024; Zamdeddy, 2024). Pada Provinsi Papua Tengah, pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki tantangan tersendiri, mengingat kondisi geografis yang unik dan keragaman kebutuhan daerah. Dalam hal ini, Inspektorat Provinsi Papua Tengah berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan (Ramadhan, 2024; Yudha, 2023). Salah satu proses kunci dalam pengelolaan Barang Milik Daerah adalah revidi kebutuhan barang, yang bertujuan untuk menilai, menilai kembali, dan memastikan bahwa barang yang diadakan sejalan dengan kebutuhan operasional dan prioritas strategis daerah. Namun, efektivitas proses revidi ini sangat bergantung pada kompetensi dan tingkat keahlian para pegawai yang melaksanakannya (Y. R. H. Wibowo et al., 2019).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusman Tangilomban,dkk (2022) meneliti tentang Penerapan Revidi Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *urnal Administrasi Publik*. Volume XVIII (2) 2022: 231-262. P-ISSN: 1858-2168, E-ISSN: 2621-251X. doi : 10.52316/jap.v18i2.119. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revidi spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) barang/jasa sudah berjalan sebagaimana mestinya (Tangilomban & Mauliana, 2022). Namun, untuk pekerjaan teknis, pokja pemilihan belum memiliki kesamaan persepsi dikarenakan pokja pemilihan tidak semuanya memiliki kualifikasi teknis. Begitupun dengan PPK yang sulit dalam menyusun spesifikasi teknis (Tangilomban & Mauliana, 2022). Untuk revidi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan dan penetapan HPS telah disadari akan membawa risiko apabila dilakukan secara tidak cermat. Pada revidi rancangan kontrak, ditemukan bahwa PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) sehingga sulit menentukan jenis kontrak yang digunakan (Agus Arif Rakhman, 2021, 2022). Revidi analisis pasar terbukti dapat mengurangi resiko, karena semakin banyak informasi, data, dan pengetahuan pasar, maka penyusunan HPS akan lebih baik. Selanjutnya revidi ID paket RUP dan dokumen anggaran, PA/KPA/PPK telah mengumumkan data RUP ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional, sehingga ID paket RUP dan anggaran telah sesuai. Revidi waktu penggunaan barang berdampak pada proses pemilihan penyedia barang/jasa. Semakin dekat waktu pemanfaatan/penggunaan barang/jasa, maka waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin kecil.

Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan fokus penelitian pada Kompetensi, Tingkat Keahlian dan Reviu kebutuhan Barang Milik Daerah. Hasil pengamatan peneliti pada obyek penelitian ini menemukan beberapa fenomena terkait fokus penelitian ini (Saadah et al., 2022). Fenomena utama yang terjadi di lingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah, terkait tentang Kebutuhan Akan Kompetensi Khusus pelaksana Reviu BMD, yang memerlukan kompetensi khusus termasuk pengetahuan tentang regulasi aset, kemampuan analisis data, dan pemahaman tentang kebutuhan operasional instansi. Kompetensi adalah apa yang para outstanding performers lakukan lebih sering pada lebih banyak situasi dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan para average performers (Rivai, 2016). Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (M. K. Wibowo, 2016). Robbins (2016) keahlian adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Indonesia, 2008). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 tentang “reviu”, yang dimaksud dengan “reviu” adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Hasibuan, 2018). Pegawai harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan ini untuk melakukan reviu yang efektif. Masih beragamnya Tingkat Keahlian pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dalam melakukan reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga pelaksanaannya terkesan lambat, sehingga masih perlu untuk mengidentifikasi kesenjangan keahlian dengan menyediakan pelatihan yang sesuai untuk memastikan standar kompetensi yang konsisten di seluruh tim kerja yang ada. Kompetensi dan keahlian yang memadai dapat meningkatkan efektivitas reviu dengan memastikan bahwa semua keputusan terkait Barang Milik Daerah didasarkan pada analisis yang akurat dan objektif (Hilman et al., 2021). Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisiensi anggaran. Secara umum di Papua Tengah memiliki tantangan geografis yang unik yang dapat mempengaruhi akses ke pelatihan dan pengembangan profesional (Rachmawati et al., 2024). Hal ini dapat mempengaruhi kompetensi dan keahlian pegawai di daerah terpencil (Pomeo & Winarti, 2024). Sehingga diperlukan Peran Teknologi, Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dapat mendukung peningkatan kompetensi dan keahlian, misalnya melalui pelatihan online atau penggunaan alat digital untuk analisis data Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya Budaya Organisasi di Inspektorat dapat mempengaruhi bagaimana kompetensi dan keahlian dikembangkan dan diterapkan. Dukungan dari pimpinan diperlukan dan adanya budaya ingin belajar yang kuat dapat mempercepat peningkatan kompetensi. Dalam meningkatkan kompetensi dan keahlian juga berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pegawai yang kompeten cenderung lebih mampu memastikan bahwa proses reviu dilakukan sesuai dengan standar etika dan regulasi. Pelatihan, Pengembangan dan program pelatihan masih perlu dirancang khusus

untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan meningkatkan tingkat keahlian pegawai, dengan menginvestasikan sumber daya dalam teknologi yang dapat memfasilitasi pelatihan dan reviu yang lebih efisien. Mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan berkelanjutan kompetensi dan keahlian pegawai di Inspektorat. Dengan Memahami fenomena ini dapat membantu Inspektorat Provinsi Papua Tengah untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memastikan bahwa barang milik daerah dikelola secara optimal (Ramadhan, 2024). Fenomena analisis kompetensi dan tingkat keahlian dalam melakukan reviu kebutuhan Barang Milik Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah mencerminkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan dan keterampilan para pegawai yang terlibat dalam proses ini. Memahami fenomena ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah, serta bagaimana peningkatan kompetensi dan keahlian dapat berkontribusi pada pengelolaan yang lebih baik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Kompetensi dan Tingkat Keahlian dalam melakukan Reviu kebutuhan Barang Milik Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini mulai dari kegiatan Survei, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Infroman penelitian ini sebanyak 10 orang pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Metode analisis pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data pada penelitian ini mulai dari: Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

KOMPETENSI PEGAWAI DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH

Kompetensi pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa pegawai harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan barang milik daerah dan pelaksanaan reviu sebagai bagian dari pengawasan. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa kompetensi pegawai saat ini sudah cukup baik dalam memahami regulasi pengelolaan barang milik daerah. Meskipun demikian, ada kebutuhan untuk terus meningkatkan kompetensi ini, terutama dalam beberapa aspek penting. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup pengetahuan dalam audit dan pengawasan, kemampuan analisis dan penyusunan laporan, kemampuan komunikasi dan kerja sama tim, keterampilan teknologi informasi, pemahaman tentang hukum dan peraturan daerah, serta integritas dan etika profesional. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menghadapi dinamika lokal yang mungkin mempengaruhi pengelolaan barang milik daerah.

Pegawai di Inspektorat memiliki masa kerja yang cukup lama dan pendidikan sarjana, yang memberikan dasar yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok mereka. Pendidikan yang relevan, baik pada tingkat Strata 1 maupun Strata 2, memungkinkan pegawai untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengelolaan barang milik daerah. Namun, meskipun pegawai telah mengikuti beberapa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam analisis kebutuhan barang milik daerah, masih diperlukan pelatihan yang lebih terfokus dan berkelanjutan untuk mengatasi kekurangan yang ada.

Faktor utama yang mendukung kompetensi pegawai dalam melakukan reviu barang milik daerah meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM), tingkat pendidikan, dan pemahaman pegawai tentang proses reviu itu sendiri. Pengalaman dalam pengawasan juga sangat penting, karena pengalaman lapangan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam menganalisis dan mengevaluasi barang milik daerah secara efektif.

Adapun kompetensi yang dibutuhkan bagi pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, diantaranya:

1. Pengetahuan dalam Audit dan Pengawasan.

Pegawai di inspektorat harus memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip audit, pengawasan, dan akuntabilitas keuangan daerah. Mereka perlu memahami regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, serta peraturan-peraturan lain yang mendasari kerja pemerintahan daerah.

2. Kemampuan Analisis dan Penyusunan Laporan.

Pegawai harus memiliki keterampilan analisis yang kuat untuk mengevaluasi laporan keuangan dan dokumen terkait, serta untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran atau kebijakan. Kemampuan menyusun laporan audit yang jelas dan berbasis data juga sangat penting.

3. Kemampuan Komunikasi dan Kerja Sama Tim.

Mengingat Inspektorat sering berhubungan dengan berbagai pihak, baik internal pemerintah daerah maupun eksternal, kemampuan komunikasi yang baik sangat penting. Pegawai harus bisa menyampaikan temuan audit dengan jelas dan bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan.

4. Keterampilan Teknologi Informasi.

Pegawai di inspektorat juga harus terampil dalam menggunakan perangkat teknologi informasi yang mendukung tugas mereka, seperti perangkat lunak audit dan pengelolaan data, serta sistem informasi keuangan daerah.

5. Pemahaman tentang Hukum dan Peraturan Daerah.

Pemahaman tentang hukum dan regulasi daerah menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pegawai inspektorat dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Papua Tengah, khususnya mengenai pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan.

6. Integritas dan Etika Profesional.

Pegawai harus menunjukkan integritas yang tinggi, karena mereka bekerja di bidang yang sangat berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Etika profesional dalam menjalankan tugas pengawasan juga menjadi kompetensi yang tak terpisahkan.

7. Kemampuan Menghadapi Dinamika Lokal.

Mengingat Papua Tengah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, pegawai inspektorat perlu memahami konteks lokal dalam melaksanakan tugas mereka. Kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan lokal dan bersikap sensitif terhadap budaya setempat juga menjadi nilai tambah.

Kompetensi pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah sudah cukup mendukung tugas pokok mereka, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan fokus pada peningkatan pelatihan yang lebih relevan dan berkelanjutan, serta penguatan dalam aspek-aspek kompetensi yang masih kurang, diharapkan pegawai dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengelolaan barang milik daerah. Peningkatan kompetensi ini akan berkontribusi pada efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, mendukung tujuan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

TINGKAT KEAHLIAN PEGAWAI DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH

Tingkat keahlian pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan aspek penting yang menentukan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan data yang ada, tingkat keahlian pegawai sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yaitu pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan pengembangan karier.

Pendidikan pegawai di Inspektorat sangat mendukung tugas-tugas yang mereka

emban. Sebagian besar pegawai memiliki gelar sarjana (S1) di bidang-bidang yang relevan seperti Akuntansi, Manajemen, Hukum, Ekonomi, dan Administrasi Publik. Pendidikan di bidang-bidang ini memberikan dasar yang kuat dalam pengertian teori dan praktik yang diperlukan untuk melakukan audit dan pengawasan secara efektif. Selain itu, pegawai yang memiliki gelar pendidikan yang lebih tinggi, seperti S2, atau sertifikasi profesional di bidang audit, akuntansi pemerintahan, dan pengawasan keuangan negara, akan memiliki keahlian yang lebih spesifik dan relevan untuk tugas-tugas pengawasan dan reuiu.

Pengalaman kerja pegawai juga berkontribusi besar terhadap tingkat keahlian mereka. Pegawai yang memiliki masa kerja yang lebih panjang cenderung lebih memahami dinamika dan tantangan dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengalaman lapangan ini memungkinkan pegawai untuk menerapkan pengetahuan teoretis yang telah mereka pelajari dalam situasi nyata, sehingga meningkatkan kemampuan analitis dan pengambilan keputusan mereka.

Pelatihan dan pengembangan karier yang berkelanjutan memainkan peran penting dalam meningkatkan keahlian pegawai. Dengan mengikuti program pelatihan yang relevan, pegawai dapat memperbarui pengetahuan mereka mengenai regulasi terbaru dan praktik terbaik dalam pengelolaan barang milik daerah. Saat ini, pegawai di Inspektorat telah memiliki sertifikasi yang relevan dalam pengelolaan barang milik daerah, yang menunjukkan bahwa mereka telah menginvestasikan waktu dan usaha untuk memperdalam keahlian mereka. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas pegawai tetapi juga memberikan mereka alat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik.

Namun, meskipun tingkat keahlian pegawai di Inspektorat sudah cukup baik, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Penguatan dalam pelatihan yang lebih spesifik dan terfokus pada kebutuhan yang ada akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan barang milik daerah. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terencana, Inspektorat dapat memastikan bahwa pegawai selalu siap menghadapi dinamika dan tuntutan yang berkembang dalam pengelolaan aset daerah.

Tingkat keahlian pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menunjukkan potensi yang baik untuk pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan akuntabel. Dengan terus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan, Inspektorat dapat meningkatkan kapasitas pegawai, yang pada gilirannya akan mendukung tujuan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

PROSES REUIU KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH

Proses reuiu kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan komponen penting dalam upaya pengawasan dan pengelolaan aset daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan BMD dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan aset publik.

Proses reuiu BMD di Inspektorat melibatkan beberapa langkah yang sistematis, yang masing-masing memiliki peran penting dalam penilaian dan verifikasi. Langkah-langkah tersebut umumnya mencakup: Pengumpulan Data, dimana Pegawai di Inspektorat mulai dengan mengumpulkan data terkait BMD yang ada, termasuk informasi mengenai jenis, jumlah, kondisi, dan lokasi barang. Data ini biasanya diperoleh dari laporan pengelolaan sebelumnya serta dokumen pendukung lainnya. Melakukan Verifikasi Kecukupan, setelah data terkumpul, pegawai melakukan verifikasi untuk menilai kecukupan BMD yang ada. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis barang yang dimiliki sudah sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintah daerah. Jika ada kekurangan, pegawai perlu mencatat dan melaporkan kebutuhan tambahan yang diperlukan. Selanjutnya, proses reuiu mencakup penilaian terhadap pemanfaatan BMD. Pegawai akan menilai apakah barang-barang tersebut digunakan secara optimal dan sesuai dengan fungsinya. Penilaian ini mencakup analisis tentang efisiensi penggunaan barang serta identifikasi barang yang tidak

terpakai atau tidak efektif. Proses reviu juga melibatkan evaluasi terhadap pengelolaan BMD. Pegawai akan menilai apakah pengelolaan barang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Ini termasuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta identifikasi potensi penyimpangan atau inefisiensi. Setelah melalui langkah-langkah tersebut, pegawai menyusun laporan hasil reviu yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi ini dapat mencakup saran untuk pengadaan barang baru, perbaikan pengelolaan, atau penghapusan barang yang tidak lagi diperlukan. Laporan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan dan stakeholder terkait untuk ditindaklanjuti.

Berikut adalah tahapan dalam proses reviu kebutuhan Barang Milik Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:

1. Perencanaan Reviu
 - a. Penentuan Tujuan Reviu. Langkah pertama dalam proses reviu adalah menentukan tujuan reviu, yaitu untuk memverifikasi kecocokan antara data Barang Milik Daerah yang tercatat dengan kondisi aktual barang dan memastikan barang yang ada sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - b. Identifikasi Area yang Akan Direviu. Pegawai di Inspektorat menentukan area atau unit kerja yang akan dilakukan reviu, termasuk jenis barang yang akan diperiksa (misalnya, kendaraan dinas, peralatan kantor, atau infrastruktur).
 - c. Penyusunan Jadwal. Inspektorat membuat jadwal reviu yang mencakup waktu pelaksanaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk penentuan sumber daya yang dibutuhkan, seperti tim audit atau petugas pemeriksa lapangan.
2. Pengumpulan Data dan Informasi
 - a. Pemeriksaan Dokumen Administratif: Sebelum melakukan verifikasi fisik, pegawai Inspektorat akan mengumpulkan dan memeriksa dokumen administratif terkait BMD. Ini termasuk data dari Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA), laporan inventaris, dan dokumen pengadaan Barang Milik Daerah.
 - b. Verifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah. Pegawai akan memeriksa apakah barang yang tercatat di sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah. Misalnya, apakah ada barang yang tidak lagi dibutuhkan atau barang yang tidak terpakai selama periode tertentu.
 - c. Evaluasi Kesesuaian dengan Rencana Kebutuhan. Inspektorat akan mengevaluasi apakah kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana pengeluaran daerah dan apakah barang yang ada cukup atau berlebihan untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi pemerintah.
3. Pemeriksaan Lapangan (Verifikasi Fisik)
 - a. Cek Fisik Barang. Salah satu bagian penting dalam reviu adalah pemeriksaan fisik terhadap Barang Milik Daerah yang tercatat di sistem. Tim Inspektorat akan melakukan inspeksi langsung untuk memastikan bahwa barang yang tercatat masih ada, berada dalam kondisi baik, dan berfungsi sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - b. Pencocokan Fisik dengan Dokumen. Pegawai memeriksa apakah barang yang ada sesuai dengan dokumen administratif seperti laporan inventaris, kartu aset, dan dokumen lainnya. Jika ada barang yang hilang atau rusak, maka perlu dicatat dan dianalisis penyebabnya.
 - c. Penilaian Kondisi Barang. Selain memeriksa keberadaan barang, tim juga menilai kondisi barang tersebut. Ini penting untuk mengetahui apakah barang masih layak pakai atau perlu diganti, diperbaiki, atau disusutkan.
4. Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan BMD
 - a. Evaluasi Pengelolaan BMD: Setelah verifikasi fisik, Inspektorat akan menganalisis bagaimana barang digunakan. Apakah BMD dikelola dengan efisien, apakah ada barang yang tidak dimanfaatkan dengan optimal, atau apakah ada kelebihan barang yang tidak dibutuhkan.
 - b. Identifikasi Potensi Pemborosan atau Kekurangan: Pegawai Inspektorat juga akan mengidentifikasi jika ada potensi pemborosan atau ketidaksesuaian dalam

pengelolaan BMD. Misalnya, barang yang berlebihan atau tidak digunakan dapat menambah biaya pemeliharaan yang tidak perlu.

- c. Perbandingan dengan Standar Kebutuhan: Barang yang terdaftar dibandingkan dengan standar kebutuhan organisasi dan analisis terkait fungsi dan jumlah barang. Proses ini penting untuk menentukan apakah pengadaan barang baru diperlukan atau barang lama bisa dipertahankan.
5. Identifikasi Masalah dan Penyimpangan
 - a. Pencatatan Temuan: Dalam tahap ini, Inspektorat akan mencatat semua temuan yang ditemukan selama proses reviu, termasuk barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, barang yang tidak terpakai, atau barang yang rusak dan memerlukan penggantian.
 - b. Penyimpangan dari Peraturan atau Kebijakan: Jika ditemukan penyimpangan dari kebijakan pengelolaan BMD atau prosedur yang berlaku, pegawai Inspektorat akan mencatatnya. Penyimpangan ini bisa berupa pengadaan yang tidak sesuai prosedur atau barang yang tidak didaftarkan dengan benar.
 6. Penyusunan Laporan Hasil Reviu
 - a. Dokumentasi Hasil Reviu: Setelah proses verifikasi selesai, pegawai Inspektorat akan menyusun laporan yang mencakup temuan-temuan selama reviu. Laporan ini mencakup temuan fisik, kecocokan antara data dan kondisi BMD, serta analisis tentang kebutuhan barang dan pengelolaannya.
 - b. Rekomendasi: Dalam laporan, Inspektorat juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan, seperti penghapusan BMD yang tidak terpakai, pengadaan barang baru yang dibutuhkan, atau perbaikan pengelolaan BMD yang ada.
 - c. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut: Rencana tindak lanjut perlu disusun berdasarkan temuan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan BMD di masa depan, baik dari segi pengadaan, pemanfaatan, atau pemeliharaan.
 7. Penyampaian Laporan dan Tindak Lanjut
 - a. Pengajuan Laporan kepada Pimpinan: Laporan hasil reviu disampaikan kepada pimpinan di Inspektorat dan instansi pemerintah yang terkait. Laporan ini berisi temuan, analisis, dan rekomendasi yang harus diimplementasikan untuk memperbaiki pengelolaan BMD.
 - b. Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi: Pihak yang bertanggung jawab, seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau unit terkait, akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Tindak lanjut ini dapat berupa pengadaan ulang, penghapusan barang, atau perubahan prosedur pengelolaan.
 8. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Pemantauan Implementasi Rekomendasi: Inspektorat melakukan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi yang telah diajukan untuk memastikan bahwa perubahan atau perbaikan yang diperlukan benar-benar diterapkan.
 - b. Evaluasi Kinerja: Setelah beberapa waktu, Inspektorat akan mengevaluasi apakah perubahan dalam pengelolaan BMD telah meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan daerah dengan lebih baik.

Proses Reviu Barang Milik Daerah yang dilakukan dengan cermat dan sistematis tidak hanya memastikan bahwa pengelolaan barang milik daerah berjalan dengan baik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan aset publik. Dengan adanya proses ini, Inspektorat dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta mendorong penggunaan yang lebih efisien dan efektif. Proses reviu kebutuhan Barang Milik Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah adalah langkah strategis dalam pengawasan pengelolaan aset daerah yang akan mendukung tujuan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan terus meningkatkan kualitas dan efektivitas proses ini, Inspektorat akan berperan penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pengelolaan barang milik daerah.

Kesimpulan

Kompetensi pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah sudah cukup mendukung tugas pokok mereka, terutama dalam reviu kebutuhan Barang Milik Daerah. Dengan tingkat keahlian yang baik serta latar belakang pendidikan dan sertifikasi yang relevan, pegawai memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan pengawasan dan reviu secara optimal. Proses reviu Barang Milik Daerah dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui beberapa tahap, mulai dari perencanaan reviu, pengumpulan data dan informasi, pemeriksaan lapangan (verifikasi fisik), analisis kebutuhan dan pengelolaan aset, identifikasi masalah dan penyimpangan, penyusunan laporan hasil reviu, penyampaian laporan, tindak lanjut, hingga monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan dengan baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan aset publik. Untuk lebih mengoptimalkan proses ini, disarankan agar pelatihan yang relevan dan berkelanjutan terus ditingkatkan guna memperkuat kompetensi pegawai, serta menerapkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan aset agar lebih efisien, akurat, dan terintegrasi.

BIBLIOGRAFI

- Agus Arif Rakhman, M. M. (2021). *Buku Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Versi Perpres No. 16 Tahun 2018: Edisi kedua*. Prenada Media.
- Agus Arif Rakhman, M. M. (2022). *Buku kerja pejabat pembuat komitmen: Kupas Tuntas Pengelolaan Kontrak Versi Perpres No. 12 Tahun 2021 Edisi Ketiga*. Prenada Media.
- Governance, S. (2024). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Zamdedy. *Syntax*, 6(04).
- Hasibuan, S. I. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Penghapusan Gedung BAPPEDA dan Bina Graha di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)*.
- Hilman, N., Laekkeng, M., & Amiruddin, A. (2021). Pengaruh akuntabilitas, skeptisme profesional, kompetensi auditor, dan e-audit terhadap kualitas hasil audit pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 303–332.
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Nur, M. J., Mattalitti, M. I., & Ahmad, R. G. (2024). Tata kelola aset barang milik daerah berbasis e-BMD pada Dinas Pertanian Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 7(3), 1752–1766.
- Pomeo, W. R. R., & Winarti, E. (2024). Dinamika Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil: Tantangan dan Realitas Lapangan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 2309–2329.
- Rachmawati, R., Rohmah, A. A., Musthofa, A., Wibisono, H., & Ghiffari, R. A. (2024). *Pengembangan Ekosistem Digital Wilayah Kepulauan: Eksplorasi Tojo Una-Una*. UGM PRESS.
- Ramadhan, V. B. (2024). *Evaluasi, Efisiensi, dan Efektivitas Penatausahaan Aset di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.

- Rivai, V. (2016). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Manajemen*, Jilid 1 Edisi 13, Alih. Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta.
- Rusman Tangilomban, Muttaqin, & Deasy Mauliana. (2022). Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 231–262. <https://doi.org/10.52316/jap.v18i2.119>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64.
- Tangilomban, R., & Mauliana, D. (2022). Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 231–262.
- Wibowo, M. K. (2016). *Manajemen Kinerja*, Edisi 5. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wibowo, Y. R. H., Karamoy, H., & Kalangi, L. (2019). Pengaruh Kompetensi Pegawai, Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Rumah Sakit TNI AD Di Kesda XIV/Hasanuddin. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill "*, 10(1), 36–46.
- Yudha, P. (2023). *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung*. Universitas Lampung.
- Zamdedy, Z. (2024). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah. *Syntax Idea*, 6(4), 1545–1553.

Copyright holder:

Maryanti Sannang Madao, Manuel A. Todingbua, Amir Jaya (2025)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

